

**GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION
IN Dr. M. YUNUS GENERAL HOSPITAL BENGKULU**

Padli⁽¹⁾
Fahrudin JS Fareke⁽²⁾
Sugeng Susetyo⁽³⁾

Manajemen. Universitas Bengkulu

The purpose of this research is to know government internal control system implementation in Dr. M. Yunus general hospital Bengkulu. This research is a descriptive research. The population of this study is 42 people. The sample of this study was taken by census method. Data analysis in this research use descriptive statistic method. The results showed that the environment control dimension in government internal control system is accordance with government regulation number 60 year 2008, risk assessment and control activities dimensions are not fully accordance with government regulation number 60 year 2008, communication and information dimensions in accordance with government regulation number 60 Year 2008, and the internal control monitoring dimensions is accordance with government regulation number 60 year 2008. Suggestion for Dr. M. Yunus general hospital Bengkulu is to improve the realization of the role of effective internal government oversight apparatus, improve the risk assessment not maximal, especially on risk assessment in the workplace in accordance with government regulation number 60 year 2008. Improving and able to establish and review on performance indicators and measures in accordance with government regulation number 60 Year 2008, maintaining and improving communication and information that has been in accordance with government regulation number 60 year 2008 by utilizing various existing communication means and improving monitoring that has not been maximally monitored by conducting continuous monitoring in accordance with government regulation number 60 year 2008.

Keywords: Government Internal Control System; Control Environment; Risk Assessment; Control Activities; Information and Communication Systems; Monitoring Internal Control

(1) Student of Magisterial Management Program

(2) Thesis Supervisor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semangat reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari good governance secara konsisten. Akuntabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh unit-unit pengawasan Intern maupun eksternal yang ada atau tindakan pengendalian oleh masing-masing instansi pemerintah (Arieswibowo, 2009).

Transparansi dilaksanakan dalam sistem penganggaran, setiap pengeluaran anggaran harus memiliki acuan dan kerangka yang jelas alasan munculnya suatu mata anggaran, selanjutnya proses perencanaan dan penganggaran daerah membutuhkan sistem pengendalian agar perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengacu pada tujuan tersebut proses perencanaan daerah memiliki hubungan dengan sistem pengendalian keuangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Yuwono, 2005). Diantara alat ukur keberhasilan dari kinerja suatu pemerintahan adalah dengan mengetahui berapa besarnya kemampuan untuk menyerap anggaran yang telah direncanakan di dalam APBD. Daya serap anggaran merupakan tolak ukur kinerja finansial pemerintah daerah, sekaligus menggambarkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selama satu dekade terakhir, peran sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah mendapat perhatian luas dari para auditor intern, auditor ekstern, penyusun laporan keuangan asosiasi profesi, dan badan-badan legislatif serta para birokrat. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah banyaknya kejadian yang terkait dengan kegagalan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan bisnis pemerintah, seperti terjadinya penggelapan pajak, penyuapan, pencurian informasi, penyalahgunaan aset negara, serta penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai ketentuan (Rizal, 2013).

Pada Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan pengelolaan keuangan daerah untuk yang keempat kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu (kupasbengkulu.com, 29 Mei 2015). Namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK (2015) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2014 atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) tersebut terdapat 6 temuan dan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan terdapat 9 temuan. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada LKPD Tahun 2013 terdapat 8 temuan atas SPI dan 7 temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Pada LKPD Tahun 2012 terdapat 16 temuan atas SPI dan 7 temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dan pada LKPD Tahun 2011 terdapat 5 temuan atas SPI dan 10 temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang menyebabkan kerugian negara/daerah antara lain berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif, pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan belanja atau pengadaan fiktif lainnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu yang melayani pasien meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Fasilitas pelayanan kesehatan saat ini perkembangannya sangat signifikan, terutama pelayanan kesehatan rumah sakit sehingga masyarakat akan memilih fasilitas yang berkualitas. Perubahan status RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu menjadi Badan Layanan Umum Daerah, SK Gubernur No.320 XXVII Tahun 2009 menjadikan RSUD Dr. M. Yunus lebih baik dalam pengelolaan yang berkualitas dan professional sebagai PPK - BLUD. Dalam rangka mewujudkan Visi RSUD Dr.M. Yunus Bengkulu menjadi rumah sakit rujukan, pendidikan, penelitian yang terpercaya dan mempunyai daya saing Se-Sumatera perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai visi yang di maksud. Salah satu komponen yang dibutuhkan adalah pengawasan internal yang dimaksudkan untuk mencegah secara dini tindakan yang akan menyimpang dari jalur pencapaian tujuan organisasi, (Profil RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu Tahun 2016).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 39 tentang rumah sakit menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan rumah sakit harus dilakukan audit. Pelaksanaan audit berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dadan Layanan Umum Daerah pasal 123 menetapkan bahwa pemeriksaan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal. Untuk melaksanakan itu semua sebagai satuan yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan operasional rumah sakit, Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai peranan yang besar, (Profil RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu Tahun 2016).

Kasus proyek pengadaan Alkes di Rumah Sakit M Yunus, Bengkulu yang bernilai Rp 19,7 yang dianggarkan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2012 yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara (<http://kupasbengkulu.com>, 5 Desember, 2014). Selain itu kasus yang dikutip dari Harian Rakyat Bengkulu, dimana Majelis Tinggi Lekra (Lentera Rakyat) melaporkan Gubernur Bengkulu ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus korupsi honor Tim Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu, kali ini Lekra melaporkan Gubernur Bengkulu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, (Harian Rakyat Bengkulu, 2014).

Dari contoh kasus diatas menunjukkan bahwa pengendalian sangat penting karena pengendalian bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Secara luas, fungsi pengendalian juga mencakup usaha pencegahan kemungkinan terjadinya suatu deviasi atau penyimpangan. Sistem pengendalian manajemen mencakup pengendalian yang bersifat preventif berupa perancangan suatu sistem pengendalian maupun pengendalian yang bersifat pendeteksian. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian tentang **“Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu”**.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian yang dilakukan ini adalah membandingkan pengendalian intern yang telah dilaksanakan oleh RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dengan pengendalian intern yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008, guna untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan kegiatan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan tujuan SPIP ditinjau dari Lingkungan Pengendalian?.
2. Apakah pelaksanaan kegiatan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan tujuan SPIP ditinjau dari Penilaian Risiko?.
3. Apakah pelaksanaan kegiatan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan tujuan SPIP ditinjau dari Aktivitas Pengendalian?.
4. Apakah pelaksanaan kegiatan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan tujuan SPIP ditinjau dari Sistem Komunikasi dan Informasi?.
5. Apakah pelaksanaan kegiatan pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan tujuan SPIP ditinjau dari Pemantauan Pengendalian Intern?.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah maka Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Lingkungan Pengendalian.
2. Untuk mengetahui gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Penilaian Risiko.
3. Untuk mengetahui gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Aktivitas Pengendalian.
4. Untuk mengetahui gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Sistem Komunikasi dan Informasi.
5. Untuk mengetahui gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Pemantauan Pengendalian *Intern*.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Sitorus (2009), COSO memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah: 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) 2. Penilaian Risiko Manajemen (*Management Risk Assessment*) 3. Sistem Komunikasi dan Informasi (*Information and Communication System*) 4. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*) 5. Pemantauan (*Monitoring*).

Konsep COSO ini kemudian diadopsi oleh pemerintah dengan melakukan modifikasi pada sub-sub komponen di atas dengan berbagai referensi lain sehingga lahirlah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai ketentuan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58. SPIP menetapkan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam 5 (lima) unsur, yaitu: 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Aktivitas Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; dan 5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

1) Unsur Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Peningkatan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Unsur Penilaian Resiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko.

3) Unsur Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan sumber daya manusia
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- f. Pemisahan fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern; serta transaksi dan kejadian penting

4) Unsur Informasi dan Komunikasi

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Unsur Pemantauan Pengendalian

Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan
- b. Valuasi terpisah
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

Gambar 1.1
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN



Sumber : *Intern Control – Integrated Framework COSO, 1994*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*. Menurut sugiyono (2014) Penelitian *deskriptif* adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Metode penelitian *deskriptif* digunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.

Populasi

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu dan populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang, Eselon II 1 orang, Eselon III 12 orang, Eselon IV 21 orang dan Tim SPI 8 orang.

Sampel

Sampel penelitian diambil dengan metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan metode *sensus* ini diharapkan hasilnya akan cenderung dapat mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil terjadinya kesalahan atau penyimpangan terhadap nilai populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 orang, Eselon II 1 orang, Eselon III 12 orang, Eselon IV 21 orang dan Tim SPI 8 orang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data utama dilakukan dengan teknik survey. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan hasil wawancara.

Teknik Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014), dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam analisis statistik deskriptif penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Khusus dalam penelitian ini hanya menggunakan tabel distribusi frekuensi dan rata-rata. Tujuannya untuk mengetahui persepsi rata-rata jawaban responden terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Persepsi responden diukur dengan skala *likert* mulai dari “Tidak Setuju” yang diberi skor 1 sampai dengan “Sangat Setuju” yang diberi skor 5.

Teknik Analisis Kualitatif

Dalam tahapan ini setiap data diberikan pengertian sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian ini dimaksudkan untuk menganalisis inti pemikiran yang ada dalam data. Adapun teknik yang dapat dilakukan yaitu :

- 1) Reduksi data yaitu menyederhanakan data yang banyak dengan membuat abstraksi sehingga diketahui secara jelas inti sari dan tema pokoknya yang sesuai dengan fokus masalah yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- 2) *Display* data yaitu dengan mensistematiskan pokok-pokok informasi dengan tema dan polanya yang nampak akan ditarik suatu kesimpulan sehingga data informasi yang dikumpulkan akan bermakna, mengingat data yang terkumpul semakin banyak sehingga dapat memberikan gambaran dan dapat disajikan secara sistematis dengan memperhatikan kronologinya dan ditonjolkan pokok-pokoknya sehingga dapat dikuasai secara jelas.
- 3) Penyimpulan data dan verifikasi yaitu merangkum data dan informasi dalam *display* sehingga bermakna karena kesimpulan awal biasanya relatif, maka agar kesimpulan semakin mantap, perlu dilakukan verifikasi selama penelitian

berlangsung. Verifikasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara yang berbeda (Moloeng, 2009). Dalam penelitian ini kepada responden akan diberikan kuisioner dan dikonfirmasi keabsahan datanya dengan wawancara. Penyimpulan dan verifikasi merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan kalimat singkat dan bermakna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Lingkungan Pengendalian.

Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari lingkungan pengendalian dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden atas dimensi lingkungan pengendalian adalah 3,81 yaitu nilai tersebut memiliki kriteria “**Sesuai**”. Artinya bahwa penerapan Lingkungan Pengendalian secara umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. yaitu secara umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah melakukan penegakan integritas dan nilai etika dengan nilai rata-rata 4,17 dengan kriteria sesuai yang berarti bahwa penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan fakta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah dilakukan penegakan integritas dan nilai etika dengan nilai rata-rata 4,17 dengan kriteria sesuai yang berarti bahwa penegakan integritas dan nilai etika telah dilaksanakan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan fakta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah disusun dan diterapkannya aturan disiplin pegawai dengan cara ditegakkannya disiplin atas penyimpangan terhadap pelanggaran kebijakan atau prosedur dan aturan, penandatanganan pakta integritas bagi seluruh karyawan, serta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu juga sangat memperhatikan kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku yang tidak etis, contohnya pegawai dilarang ikut dalam kegiatan partai politik. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu juga telah memiliki komitmen terhadap kompetensi dengan nilai rata-rata 4,07 dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berarti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi karyawan, menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya, serta memilih pimpinan/ketua tim setiap ruangan yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu juga memiliki kepemimpinan yang kondusif dengan nilai rata-rata 4,05 dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berarti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah menerapkan manajemen berbasis kinerja, mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan serta merepon secara positif terhadap setiap pelaporan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu juga memiliki pembentukan struktur

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dengan nilai rata-rata 3,93 dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berarti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah menetapkan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, sudah adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap karyawan, melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan aturan pemerintah. Selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu juga melakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dengan nilai rata-rata 3,95 dengan kriteria sesuai, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dengan nilai rata-rata 3,95 dengan kriteria sesuai 3,76, dan memiliki hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dengan nilai rata-rata 3,95 dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

2. Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Penilaian Risiko.

Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Penilaian Resiko dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden atas dimensi penilaian resiko adalah 3,39. Nilai tersebut memiliki kriteria **“Cukup Sesuai”**. Artinya bahwa penerapan penilaian resiko di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu secara keseluruhan indikator penilaian resiko sudah dilakukan namun belum maksimal. yaitu secara umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah melaksanakan identifikasi resiko dimana pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu telah menetapkan tujuan dari rumah sakit dengan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta tujuan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Kemudian tujuan pada tingkat kegiatanpun telah dilakukan berdasarkan rencana strategis kementerian kesehatan dan dalam penetapannyapun melibatkan seluruh pejabat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu.

3. Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Aktivitas Pengendalian

Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Aktivitas pengendalian dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden atas dimensi Aktivitas pengendalian adalah 3,38 yaitu nilai tersebut memiliki kriteria **“Cukup Sesuai”**. Artinya bahwa penerapan unsur aktivitas pengendalian secara umum telah dilaksanakan meskipun dalam pelaksanaannya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu belum maksimal dilaksanakan. Adapun pelaksanaan indikator tersebut berdasarkan kuesioner yang disebarkan menunjukkan nilai rata-rata yang berbeda, dalam pelaksanaan aktivitas pengendalian seharusnya melakukan Reviu atas kinerja rumah sakit menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dilaksanakan dengan

membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan, tetapi faktanya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu revidu hanya dilakukan pada kegiatan yang besar saja dan revidu atas kinerja instansi tidak dilakukan secara terus menerus. Selanjutnya pimpinan rumah sakit telah melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, supaya pembinaan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur maka dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia pimpinan rumah sakit telah membuat uraian jabatan, prosedur dalam rekrutmen pegawai, menyiapkan anggaran program pendidikan dan pelatihan pegawai, membuat system sistem kompensasi yang selama ini telah dijalankan adalah system pembayaran insentif, adanya ketentuan disiplin pegawai, membuat sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir, penetapan dan revidu atas indikator dan ukuran kinerja, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, dan memiliki dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta melakukan transaksi dan kejadian penting.

4. Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Komunikasi dan Informasi.

Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Komunikasi dan Informasi dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden atas dimensi Komunikasi dan Informasi adalah 3,62 katagori “**Sesuai**” Artinya bahwa penerapan dimensi Komunikasi dan Informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu telah dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan rumah sakit, dan informasi telah disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu seperti komunikasi melalui komputer dengan jaringan internet untuk system informasi manajemen rumah sakit baik untuk laporan internal maupun laporan ke Kementerian Kesehatan. Dan informasi dirumah sakit juga dapat disajikan tepat waktu sehingga pimpinan rumah sakit dapat melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya terhadap informasi. Selama ini dalam pelaksanaan Komunikasi dan Informasi telah dilakukan identifikasi, pencatatan, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, komunikasi atas informasi telah diselenggarakan secara efektif sekurang-kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan mengelola, mengembangkan, serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus.. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu Komunikasi dan Informasi dikatakan telah berjalan cukup efektif dan efisien.

5. Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Pemantauan Pengendalian Intern.

Gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari Pemantauan Pengendalian *Intern* dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden atas dimensi Pemantauan Pengendalian *Intern* adalah 3,40. Nilai tersebut berada pada kategori “**Cukup Sesuai**” dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu Pemantauan Pengendalian *Intern* dikatakan telah berjalan cukup

efektif dan efisien. Artinya bahwa penerapan dimensi Pemantauan Pengendalian *Intern* di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu belum maksimal, bahwa dalam pelaksanaan Pemantauan Pengendalian *Intern* dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari lingkungan pengendalian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan pada penerapan subunsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari penilaian resiko cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan pada penerapan subunsur Analisis resiko dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari aktivitas pengendalian cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan penetapan dan reuiu atas indikator dan ukuran kinerja dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu juga cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari unsur komunikasi dan informasi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditinjau dari pemantauan pengendalian intern cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sedangkan pada penerapan subunsur pemantauan berkelanjutan dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu juga cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Saran

1. Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu diharapkan dapat memperbaiki perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu diharapkan dapat memperbaiki penilaian resiko yang belum efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terutama pada analisis resiko.

3. Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu diharapkan dapat memperbaiki dan dapat melakukan penetapan dan rewiuw atas indikator dan ukuran kinerja ditempat kerja yang belum maksimal dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
4. Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi komunikasi dan Informasi yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi yang ada.
5. Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu diharapkan dapat memperbaiki Pemantauan yang belum maksimal terpantau dengan melakukan pemantauan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad , Rivai. 2012. Analisis Dan Evaluasi Pengendalian Intern Dalam Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi Pada PT Transavia Otomasi Pratama. Journal Gundarma Vol. 4, No. 1.
- Arieswibowo, Darmadi. 2009. Control Self Assessment atas Sistem Pengendalian Intern Mekanisme Pencairan Dana Pada Bendahara Umum Daerah Pemerintah Propinsi Gorontalo. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Metode dan Praktek. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Arikunto, 2013. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Audit American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dengan judul “Intern Control – Elements of a Coordinated System and Its Importance to Management and Independence Accountant
- Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Boynton, Johnson, Kell. 2003. Modern Auditing, Edisi Ketujuh, Jakarta: Erlangga
- BPK-RI. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor: 01/LK/XVIII.BKL/05/2012 tanggal 26 Mei 2012.

- . Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2013 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 15.C/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 21 Mei 2014.
- . Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor: 09.A/LHP/XVIII.BKL/05/2013 tanggal 24 Mei 2013.
- . Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 15.B/LHP/XVIII.BKL/05/2014 tanggal 21 Mei 2014.
- . Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor : 17.C/LHP/XVIII.BKL/05/2015 tanggal 21 Mei 2015.
- . Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 atas Sistem Pengendalian Intern Nomor : 17.B/LHP/XVIII.BKL/05/2015 tanggal 21 Mei 2015.
- Elvy, Maria, Manurung. 2014. Kajian Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas. *Journal Unpar*, Vol. 2.
- Faiz, Zamzami dan Ihda, Arifin, Faiz. 2015. Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 6, No. 1.
- Gabriella, Margaretha, Kaligis. 2015. Sistem Pengendalian Intern kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15, No. 04.
- Hindriani, Nuning, 2012. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Perencanaan dan Penyerapan Anggaran di Daerah (Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun). Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Iwin, Arnova. 2012. Analisis Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin SH. Bengkulu.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja butir 3021.
- Kupasbengkulu.com. (29 Mei 2015). Pemprov Bengkulu Raih WTP Empat Kali Berturut-turut. Diakses pada tanggal 13 November 2015, di : <http://kupasbengkulu.com/pemprov-bengkulu-raih-wtp-empat-kali-berturut-turut>.
- Kusmayadi, Dedi. 2012. Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16, No. 2.
- Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 2015.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. C.V Andi Offset.
- Meidiana, Azalia, Sabella. 2014. Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas pada PT. Javas Tripta Gemala. Universitas Dian Nuswantoro.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Yogyakarta. Salemba Empat.
- Munawaroh. 2011. Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kediri). *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, Vol. 13, No. 1.
- Nawawi. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai ketentuan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58.
- Peurseem, Van, K. 2004. Internal Auditors Role and Authority. *Managerial Auditing Journal* Vol. 19, No. 3. ISSN: 0268-6902
- Putu, Mega dan Selvy, Aviana. 2012. Penerapan Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 1, No. 4.
- Rina. 2012. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. *Journal Manajemen*, Vol.1, No. 2, ISBN : 978-602-17225-0-3

- Rini, Puspita, Julianti. 2015. Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Setara Kas pada Perusahaan Distribusi (Studi Kasus PT XYZ). *Journal Bakrie*, Vol. 3, No. 02.
- Rizal, Muhammad. 2013. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda. Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.
- Robbins, S.P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi X. PT. Indeks. Jakarta
- Rosita. 2010. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2010
- Simanungkalit, Angelina A.P. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Gorontalo). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
- Sitorus. 2009. *Sistem Pengembalian Manajemen*. Bogor: BPKP. Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Tiara, Timuriana. 2010. Peranan Sistem Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengadaan Barang pada Balai Besar Pascapanen Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIMAFE)*. Vol. 2, No. 4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady.(2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Malang: Bayumedia.